

Pengelolaan Dana Desa: Peran Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat

Ridwansyah Pasolo
Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
mrpasolo@gmail.com

Informasi Artikel	Abstrak
<hr/> <p>Catatan Artikel: Diterima 2 Maret 2023 Revisi disetujui 30 Maret 2023 Dipublikasi 31 Mei 2023</p> <hr/> <p>Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi aparatur desa</p> <hr/> <p>DOI: 10.55098/vrja.v1i2.317</p>	<hr/> <p>Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada aparatur desa bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Faktanya, terdapat beberapa penyalahgunaan dana desa oleh para aparatur desa sehingga tujuan tersebut tidak tercapai. Penelitian ini menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa di Kota Jayapura. Menggunakan 50 sampel yang diambil secara <i>purposive</i> pada aparatur desa di 5 Kampung di Kota Jayapura, kami menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kota Jayapura. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kepedulian aparatur desa dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kompetensi dan partisipasi masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Kota Jayapura.</p>

Pendahuluan

Dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat diberikan kepada setiap desa di seluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup besar. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahun 2021, Pemerintah Kota Jayapura mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 112 miliar. Dana ini dibagikan ke 14 desa yang tersebar di 5 distrik atau kecamatan. Sebelumnya, pada tahun 2020, Kota Jayapura mendapat dana desa sebesar Rp 117 miliar namun terjadi pemotongan atau refocusing, sehingga yang diterima hanya sebesar Rp 102 miliar. Dana tersebut dibagikan ke 14 desa dengan besaran yang diterima setiap desa bervariasi yakni Rp5 miliar hingga Rp 11 miliar. Walikota Jayapura juga menjelaskan bahwa besaran luas wilayah dan jumlah penduduk desa yang menyebabkan perbedaan penerimaan dana desa (Evarukdijati, 2021).

Pengelolaan dana desa di beberapa tempat di Kota Jayapura ditemui beberapa masalah seperti dana desa yang diterima kampung holtekamp sebesar Rp2 Miliar dipotong 30 persen sebesar Rp700 Juta tapi baru terealisasi Rp184 juta. Kemudian anggaran pembangunan rehabilitasi sumber air bersih sebesar Rp 77 Juta tapi fakta dilapangan sampai saat ini kampung holtekamp tidak memiliki sumber air bersih. Jadi, indikasi proyek fiktif dan penyalahgunaan dana desa di kampung holtekamp sebesar Rp2 Miliar lebih (Koreri, 2022). Selain itu, ditemukan juga kasus penyalahgunaan dana desa di Kampung Tobati

senilai Rp2,5 Miliar. Penyidik unit tindak pidana korupsi Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura kini tengah melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan dana desa di kampung tobat. Dan kasus penyalahgunaan dana desa di Kota Jayapura pun pernah terjadi tepat di Kampung Koya Koso dengan total anggaran Rp5,5 Miliar (Cholid, 2020).

Dalam mencapai tujuan pengelolaan dana desa untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sejahtera diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang meliputi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat (Maina dkk., 2022b). Selain akuntabilitas, transparansi dapat memberikan hak dan kesempatan kepada publik untuk mengetahui informasi menyangkut kepentingan, aspirasi, dan pemenuhan kebutuhan layak umum. Transparansi ini akan memudahkan pengawasan sosial dari masyarakat agar kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat berhasil secara optimal dan mencegah terjadinya kecurangan (Windyastuti dkk., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho dkk., 2022)(Pahlevi dkk., 2022)(Latif dkk., 2021)(Sugiharti & Hariani, 2021)(Ramadhani & Yuliati, 2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Namun terdapat pula hasil dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Maina dkk., 2022b; Putri & Maryono, 2022a).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya memerlukan partisipasi masyarakat untuk membangun dan mengembangkan desa. Penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Putri & Maryono, 2022b); (Nugroho dkk., 2022); DAF(Hulu & Rahim, 2022); (Pahlevi dkk., 2022); (Ramadhani & Yuliati, 2021). Namun dalam penelitian (Maina dkk., 2022b) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kasus penyalahgunaan dana desa adalah kurangnya kompetensi aparatur desa. Kompetensi aparatur desa merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa (P. Dewi dkk., 2021). Terdapat hasil dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (L. P. P. Dewi & Sari, 2021; Hulu & Rahim, 2022; Julistioningsih & Widajantie, 2022; Putri & Maryono, 2022b)(L. P. P. Dewi & Sari, 2021).

Melihat pentingnya pengelolaan dana desa yang baik oleh aparatur desa serta maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian yakni Apakah akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa memengaruhi pengelolaan dana desa di Kota jayapura?

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014, Dana desa dialokasikan secara berkeadilan yakni alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dana desa juga sudah sepatutnya dikelola dengan akunabilitas yang tinggi.

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Sutisna dkk., 2021). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah bentuk pertanggungjawaban yang didasarkan pada sebuah prosedur, kebijakan, serta perundang-undangan yang berlaku sebagai fungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta dapat mendorong meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap

pengelolaan dana desa (Maina dkk., 2022b)(Putri & Maryono, 2022a)(Nugroho dkk., 2022)(Pahlevi dkk., 2022)(Latif dkk., 2021)(Sugiharti & Hariani, 2021)(L. P. P. Dewi & Sari, 2021)(Ramadhani & Yuliati, 2021).

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi. Prinsip transparansi merupakan sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan dana desa dalam setiap tahapannya yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. Hal ini didukung oleh penelitiannya sebelumnya yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana ((Nugroho dkk., 2022)(Pahlevi dkk., 2022)(Latif dkk., 2021)(Sugiharti & Hariani, 2021)(Ramadhani & Yuliati, 2021).

H₂ : Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Keterlibatan partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh dalam proses evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pemerintah dan mengurangi terjadinya penyimpangan wewenang. Selain itu, keterlibatan partisipasi masyarakat juga bertujuan demi terwujudnya anggaran yang efektif, karena dapat memberikan saran dalam penyusunan tujuan dan kebijakan anggaran (Putra & Rasmini, 2019). Terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa ((Putri & Maryono, 2022b); (Nugroho dkk., 2022); (Hulu & Rahim, 2022); (Pahlevi dkk., 2022); (Ramadhani & Yuliati, 2021).

H₃ : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi aparatur desa yaitu mencakup pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang harus dimiliki seorang aparatur desa. Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan suatu kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparatur desa dalam mewujudkan akuntabilitas. Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa dengan kompetensi yang baik akan mendukung keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini juga didukung dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (L. P. P. Dewi & Sari, 2021; Hulu & Rahim, 2022; Julistioningsih & Widajantie, 2022; Putri & Maryono, 2022b)(L. P. P. Dewi & Sari, 2021).

Kompetensi aparatur desa yaitu mencakup pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang harus dimiliki seorang aparatur desa. Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan suatu kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparatur desa dalam mewujudkan akuntabilitas. Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa dengan kompetensi yang baik akan mendukung keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini juga didukung dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (L. P. P. Dewi & Sari, 2021; Hulu & Rahim, 2022; Julistioningsih & Widajantie, 2022; Putri & Maryono, 2022b)(L. P. P. Dewi & Sari, 2021).

H₄ : Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Metoda Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif dengan survey yang dilakukan pada 50 sampel dengan kriteria tertentu dari 5 kampung yang ada di Kota Jayapura yakni 1) Kampung Holtekamp; 2) Kampung Koya Tengah; 3) Kampung Kayu Pulo; 4) Kampung Kayu Batu; dan 5) Kampung Koya Koso.

Kriteria sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu pengelola dana desa yang terdiri atas :

1. Kepala Desa.
2. Sekretaris Desa.
3. Bendahara Desa.
4. Kepala Urusan Keuangan.
5. Kepala Urusan Perencanaan.
6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
7. Pelaksana Teknis.
8. Wakil Masyarakat.

Adapun indikator dalam penelitian ini di adopsi dari beberapa penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Akuntabilitas, (Yanto & Aqfir, 2021), (Putri & Maryono, 2022b)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas kebijakan
Transparansi, (Yanto & Aqfir, 2021), (Putri & Maryono, 2022b)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informatif 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan
Partisipasi Masyarakat, (Masruhin & Kaukab, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan Keputusan 2. Penyusunan Anggaran 3. Pelaksanaan Anggaran
Kompetensi Aparatur Desa, (Masruhin & Kaukab, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keahlian 3. Kemampuan
Pengelolaan Dana Desa, (Putri & Maryono, 2022b)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Tahap penatausahaan 4. Tahap pelaporan 5. Tahap pertanggungjawaban

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *software* SmartPLS 4. Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk mengkonfirmasi teori dan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten (Ghozali, 2016). SmartPLS dibagi menjadi dua model yaitu Outer Model dan Inner Model. Outer Model terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, sedangkan Inner Model terdiri dari Koefisien Determinan dan Uji Hipotesis. SmartPLS juga memiliki keunggulan yaitu tidak membutuhkan data yang berdistribusi normal dan dapat digunakan dengan jumlah sampel yang sedikit.

Convergent Validity atau Validitas konvergen bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) setidaknya sebesar 0,5, nilai ini menggambarkan validitas konvergen memadai yang mempunyai arti bahwa satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata (Ghozali, 2016).

Validitas artinya mengukur apa yang seharusnya diukur. *Discriminant validity* dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya (Ghozali, 2016). Pengukuran validitas diskriminan menggunakan kriteria yang disampaikan *Fornell-Larcker* dan “*cross loadings*”. Postulat *Fornell-Larcker* menyebutkan bahwa suatu variabel laten berbagi varian lebih dengan indikator yang mendasarinya daripada dengan variabel-variabel laten lainnya. Nilai AVE setiap variabel laten harus lebih besar dari pada nilai R^2 tertinggi dengan nilai variabel laten lainnya. Kriteria kedua untuk validitas diskriminan adalah “*loading*” untuk masing-masing indikator diharapkan lebih tinggi dari “*cross loading*” nya masing-masing. Jika kriteria *Fornell-Larcker* menilai validitas diskriminan pada tataran konstruk (varian laten), maka “*cross loading*” memungkinkan pada tataran indikator.

Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. *Composite reliability* dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. *Rule of thumb* yang digunakan untuk nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,7 serta nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi disebut juga R-Square menjelaskan seberapa jauh data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. R-square bernilai antara 0 – 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka satu berarti semakin baik. Jika r-square bernilai 0,6 berarti 60% sebaran variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya 40% tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen atau dapat dijelaskan oleh variabel diluar variabel independen (komponen error). Jika nilai r-square kecil artinya komponen error yang besar (Ghozali, 2016).

Koefisien jalur (*path coefficients*) merupakan suatu nilai yang berguna dalam menunjukkan arah hubungan pada variabel, apakah suatu hipotesis memiliki arah yang positif atau negatif. *Path coefficient* memiliki nilai yang berbeda di rentang -1 sampai dengan 1. Jika nilai berada pada rentang 0 sampai dengan 1 maka dapat dinyatakan positif, sedangkan jika nilai berada pada rentang -1 sampai dengan 0 maka dapat dinyatakan negatif (Ghozali, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 50 kuesioner sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dimana penyebaran kuesioner dilakukan selama 2 minggu penelitian. Dari 50 kuesioner yang tersebar, terdapat 10 kuesioner yang tidak memenuhi syarat. Tingkat pengembalian dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Tingkat Pengembalian Kuisisioner

Kriteria	Jumlah	Persentase
Kuisisioner yang disebar	50	100%
Jumlah kuisisioner yang tidak kembali	0	0%
Jumlah kuisisioner yang tidak memenuhi syarat	10	20%
Jumlah kuisisioner yang memenuhi syarat	40	80%

Sumber: Data diolah

Penelitian ini menggunakan 40 kuisisioner yang selanjutnya disebut sebagai responden. Berikut profil dari para responden:

Tabel 3
Profil Responden (n=40)

Karakteristik	Level	Frekuensi	Frekuensi (%)
---------------	-------	-----------	---------------

Karakteristik	Level	Frekuensi	Frekuensi (%)
Gender	Laki-Laki	28	70
	Perempuan	12	30
Usia	20-30	8	20
	31-40	16	40
	41-50	9	22,5
	>50	7	17,5
	Tingkat Pendidikan	SD	-
	SMP	-	-
	SMA/K	15	37,5
	D3	-	-
	S1	22	55
	S2	3	7,5
	S3	-	-

Sumber: Data diolah

Evaluasi pengujian validitas menggunakan outer model yang mencakup *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *construct validity*. Berikut ialah tampilan pengujian validitas konvergen:

Tabel 4.
Hasil Uji *Convergent Validity* dan *Composite Reliability*

Variabel	Item Pengukuran	Indikator	Outer loading	Composite Reliability
Akuntabilitas	X1.1	Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum	0,816	0,907
	X1.2	Akuntabilitas Proses	0,831	
	X1.3	Akuntabilitas Program	0,836	
	X1.4	Akuntabilitas kebijakan	0,886	
Transparansi	X.2.1	Informatif	0,868	0,760
	X.2.2	Keterbukaan	0,580	
	X.2.3	Pengungkapan	0,688	
Partisipasi Masyarakat	X.3.1	Pengambilan Keputusan	0,879	0,864
	X.3.2	Penyusunan Anggaran	0,885	
	X.3.3	Pelaksanaan Anggaran	0,700	
Kompetensi Aparatur Negara	X.4.1	Pengetahuan	0,565	0,779
	X.4.2	Keahlian	0,783	
	X.4.3	Kemampuan	0,842	
Pengelolaan Dana Desa	Y.1	Tahap Perencanaan	0,870	0,894
	Y.2	Tahap Pelaksanaan	0,875	
	Y.3	Tahap Penatausahaan	0,668	
	Y.4	Tahap Pelaporan	0,846	
	Y.5	Tahap Pertanggungjawaban	0,687	

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas hasil uji validitas konvergen memiliki outer loadings berada pada kisaran 0,5 sampai 0,7 yang artinya hubungan antara indikator dengan variabel latennya dapat dikatakan memenuhi validitas konvergen. Berdasarkan data bahwa nilai *composite reliability* pada semua variabel penelitian > 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi *composite reliability* dan memiliki nilai reliabilitas yang tinggi, karena nilai *composite reliability* nya > 0,7.

Tabel 5
Hasil Uji Discriminant Validity

	Akuntabilitas X1	Kompetensi Aparatur Desa X4	Partisipasi Masyarakat X3	Pengelolaan Dana Desa Y	Transparansi X2
Akuntabilitas X1					
Kompetensi Aparatur Desa X4	0,609				
Partisipasi Masyarakat X3	0,496	0,776			
Pengelolaan Dana Desa Y	0,647	0,684	1,113		
Transparansi X2	0,910	1,053	0,637	0,636	

Sumber: Data diolah

Hasil uji validitas diskriminan di atas yaitu semua variabel laten menunjukkan konstruk yang paling besar dari setiap indikatornya dibandingkan konstruk indikator yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan pada penelitian telah memenuhi validitas diskriminan yang baik dalam penyusunan setiap variabel.

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi (Nilai R-Square)

Pengelolaan Dana Desa Y	0,873	0,861
--------------------------------	-------	-------

Koefisien determinasi disebut juga *R-Square* menjelaskan seberapa jauh data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. *R-square* bernilai antara 0 – 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka satu berarti semakin baik (Ghozali, 2016). Nilai *R-Square* dikategorikan kuat jika lebih dari 0,67, moderat jika lebih dari 0,33 tetapi lebih rendah dari 0,67, dan lemah jika lebih dari 0,19 tetapi lebih rendah dari 0,33. Berdasarkan Tabel 6 nilai koefisien determinasi (*R-Square*) pada variabel endogen Pengelolaan Dana Desa adalah sebesar 0,873, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen/bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 87,3% terhadap Pengelolaan Dana Desa (variabel dependen/terikat). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 12,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

Tabel 7
Hasil pengujian Koefisien Jalur

	P values
Akuntabilitas X1 -> Pengelolaan Dana Desa Y	0,002

	P values
Kompetensi Aparatur Desa X4 -> Pengelolaan Dana Desa Y	0,769
Partisipasi Masyarakat X3 -> Pengelolaan Dana Desa Y	0,000
Transparansi X2 -> Pengelolaan Dana Desa Y	0,627

Sumber : Output SmartPLS 4, Data diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat variabel Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai 0,002, variabel Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai 0,627, variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai 0,000, variabel Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai 0,769. Oleh karena itu, arah hubungan variabel Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa, variabel Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa, variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa, dan variabel Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa adalah Positif.

Berdasarkan pengujian hipotesis, maka keempat hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa memengaruhi pengelolaan dana desa di Kota Jayapura secara positif dan signifikan. Maknanya ialah, Semakin tinggi akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa maka semakin baik pengelolaan dana desa.

Kesimpulan

Penelitian ini melakukan investigasi atas faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa di Kota Jayapura. Menggunakan 40 sampel yang sesuai kriteria dari maka kami menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa memengaruhi pengelolaan dana desa secara positif dan signifikan di Kota Jayapura. Hasil penelitian ini dapat membantu para aparatur desa dalam meningkatkan kemampuan dari para aparatur dalam melakukan pengelolaan dana desa di Kota Jayapura agar mampu mencapai tujuan utama dari diselenggarakannya dana desa.

Daftar Pustaka

- Dewi, L. P. P., & Sari, G. A. K. R. D. (2021). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Peran Pendamping Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(01).
- Dewi, P., Ayu, G., Rencana, K., & Dewi, S. (2021). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12(01), 820–829.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hulu, F., & Rahim, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6).
- Julistioningsih, A., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(6).
- Latif, A., Savitri, E., & Susilatri. (2021). The Effect Of Accountability, Transparency And Quality Of Human Resource On Village Financial Management (Empirical Study On Village Government In Solok Regency, West Sumatra). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 183–192.

- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Sambu Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 51–59.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosob). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–139.
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(01), 2.
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(3).
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158.
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022a). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1).
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022b). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(3).
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561–571.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 11–18.
- Windyastuti, Fitriyani, L. Y., Marita, & Afifah, M. N. (2019). Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen, Blora, Central Java. *Proceeding UII-ICABE*, 177–184.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2).